

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beragam sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah fenomena kepariwisataan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 (Ismayanti, 2020). Pada hakikatnya, wisata merupakan aktivitas perseorangan atau kolektif yang dilakukan untuk menikmati sarana rekreasi tertentu, memperkaya kapasitas individu, serta mengeksplorasi keunikan bentang alam ataupun budaya dalam kurun waktu yang terbatas. Kegiatan ini bersifat multidimensional karena melibatkan beragam fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pelaku usaha, komunitas lokal, dan badan pemerintahan. Sementara itu, industri pariwisata didefinisikan sebagai kumpulan unit usaha yang saling terintegrasi dalam rangka menghasilkan komoditas dan layanan guna memenuhi tuntutan pasar selama masa perjalanan (Ismayanti dalam Ahmad, 2022). Pendapat lain mengemukakan bahwa pariwisata merupakan mekanisme kelembagaan, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, yang berkaitan erat dengan proses produksi dan distribusi barang ataupun jasa guna mengakomodasi preferensi wisatawan (Ahmad, 2022). Di sisi lain, Isdarmanto memandang industri pariwisata sebagai sektor ekonomi yang terdiri atas berbagai perusahaan dengan aktivitas produksi barang dan jasa yang bertujuan menghadirkan pengalaman rekreasi yang memuaskan bagi para pelancong (Ahmad, 2022).

Dalam struktur perekonomian nasional, sektor pariwisata Indonesia memegang peranan yang cukup dominan. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada

fungsi sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai pintu masuk bagi terciptanya lapangan pekerjaan yang cukup signifikan. Keberadaan sektor ini memberikan dampak berantai yang terasa hingga ke pelosok daerah, terutama bagi komunitas yang bermukim di kawasan yang menjadi destinasi wisata unggulan. Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi adalah dengan menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan, mengingat sektor ini dinilai sebagai peluang strategis yang selaras dengan karakteristik dan keunggulan komparatif masing-masing wilayah (Hanafi Ahmad, 2022). Lembaga keuangan sentral, yakni Bank Indonesia, turut menegaskan bahwa pariwisata merupakan instrumen paling potensial dalam upaya peningkatan perolehan devisa negara. Pandangan ini didasari oleh kenyataan bahwa seluruh elemen pendukung pengembangan pariwisata—mulai dari kondisi geografis yang mencakup bentang wilayah yang luas, kekayaan hayati, keberagaman budaya, khazanah kuliner, hingga berbagai aset lainnya—tersedia secara melimpah di dalam negeri dan tidak memerlukan ketergantungan pada sumber daya impor (Rahma, 2020).

Sektor pariwisata saat ini telah ditempatkan sebagai salah satu pilar fundamental dalam upaya pembangunan ekonomi suatu bangsa. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan bentuk usaha yang bergerak di ranah penyediaan beragam layanan dan komoditas yang ditujukan bagi para pelancong, serta mencakup seluruh bentuk belanja yang dilakukan oleh mereka selama berada di tempat tujuan (Lundberg, 1997). Pada konteks kekinian, kemajuan di bidang kepariwisataan dipandang sebagai komponen integral dari strategi pembangunan ekonomi yang

bertujuan mendorong laju pertumbuhan perekonomian sebuah negara (Sutiarso, 2018). Lebih jauh lagi, berkembangnya sektor wisata di tingkat lokal terbukti memberikan kontribusi positif terhadap kondisi perekonomian masyarakat setempat, sehingga menjadikannya sebagai salah satu andalan utama dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (Hanafi Ahmad, 2022).

Pertumbuhan sektor kepariwisataan pada suatu kawasan tujuan wisata secara otomatis memicu hadirnya beragam sarana penunjang perjalanan, antara lain penginapan berbentuk hotel, vila, rumah singgah, tempat kuliner seperti rumah makan dan kedai kopi, serta gerai-gerai yang menjual barang-barang khas atau souvenir. Kemunculan berbagai fasilitas tersebut kemudian membawa konsekuensi terhadap tingkat penghasilan serta struktur pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk di sekitar lokasi. Dalam proses pengembangan wisata, terdapat konsekuensi yang hampir pasti muncul, yakni dampak yang menyentuh aspek sosial dan ekonomi komunitas lokal. Menurut Pitana & Gayatri (2005), yang dimaksud dengan dampak kepariwisataan adalah serangkaian perubahan yang terjadi pada lingkungan, baik yang bersifat kasat mata maupun tidak, yang timbul sebagai akibat dari perbandingan kondisi sebelum dan sesudah berlangsungnya aktivitas wisata, serta meliputi pengaruh material maupun immaterial. Sebagai ilustrasi nyata, kawasan Kota Lama di Surabaya dapat dikemukakan sebagai salah satu destinasi yang memperlihatkan secara jelas pengaruh sosial-ekonomi dari dinamika kegiatan pariwisata yang berkembang di dalamnya.

Dalam tahap perumusan strategi pembangunan, Pemerintah Kota Surabaya menilai bahwa Kawasan Kota Lama menyimpan potensi besar sebagai destinasi

wisata urban yang layak untuk dikembangkan secara serius. Terdapat ambisi yang kuat dari pihak eksekutif daerah untuk merealisasikan kawasan tersebut menjadi kawasan wisata terpadu (KLTA). Akan tetapi, perjalanan untuk mewujudkan cita-cita ini ternyata menghadapi berbagai hambatan yang tidak sederhana. Pendekatan yang mengedepankan gagasan tentang rekulturasi serta pelestarian warisan bernilai monumental ternyata belum mampu menjadi daya tarik yang cukup kuat bagi para pengunjung. Di samping itu, berbagai inisiatif yang telah dilancarkan oleh pemerintah kota guna mengajak partisipasi masyarakat dalam mengangkat nilai-nilai historis kawasan ini pun sejauh ini masih menunjukkan hasil yang belum maksimal atau berada di bawah ekspektasi yang diharapkan (Pattaray & Efendi, 2020).

Keberadaan gedung-gedung tua yang sarat akan nilai historis turut memberikan karakteristik estetis tersendiri bagi lanskap Kota Surabaya. Berbagai peninggalan masa lampau, yang meliputi struktur bangunan, gaya arsitektur, prasarana fisik, serta benda-benda material lainnya, berfungsi sebagai aset kepariwisataan yang menghadirkan identitas unik bagi sebuah kota. Di kawasan Kota Lama Surabaya, seluruh bangunan bersejarah berikut keindahan narasi sejarah dan keunikan rancangan arsitekturnya tersebut, apabila ditinjau dari perspektif kepariwisataan, tergolong ke dalam jenis wisata berbasis cagar budaya (Pattaray & Efendi, 2020).

Dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis cagar budaya, upaya menjaga keseimbangan antara aksi konservasi dan eksploitasi ekonomi menjadi hal yang krusial. Sektor wisata budaya sesungguhnya berpotensi mendatangkan keuntungan

finansial bagi penduduk setempat sekaligus berperan aktif dalam mempertahankan kelestarian situs-situs bersejarah tersebut. Akan tetapi, apabila proses pengaturannya berjalan tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang memadai, aktivitas kepariwisataan jenis ini dapat mengancam keutuhan benda-benda cagar budaya bahkan hingga tatanan sosial di sekitarnya. Salah satu ilustrasi penerapan yang tergolong sukses dapat dijumpai di wilayah Bali, di mana konsep pengembangan pariwisata diintegrasikan dengan nilai-nilai kebudayaan melalui penerapan filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan terpeliharanya relasi selaras antara unsur manusia, lingkungan alam, dan hubungan spiritual dengan Tuhan (Kemendikbudristek). Pengunjung wisata cagar budaya juga diharapkan dapat lebih menghargai dan memahami nilai budaya serta sejarah tempat-tempat tersebut. Hal ini membantu memperkuat identitas dan kebanggaan budaya destinasi pariwisata di suatu kota (kemendikbudristek).

Kemendikbudristek dalam jurnalnya juga mengemukakan bahwa wisata cagar budaya adalah bentuk pariwisata yang memanfaatkan warisan budaya yang bersifat kebendaan, seperti bangunan, situs, dan struktur bersejarah. Cagar budaya ini memiliki nilai penting dalam berbagai aspek, termasuk sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010, cagar budaya di Indonesia meliputi objek yang berusia minimal 50 tahun dan harus melalui proses penetapan resmi sebelum dilindungi dan dimanfaatkan.

Upaya pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Indonesia menjadi isu penting dan berkembang sekitar tahun 1990 dalam penataan ruang di

Indonesia. Di Surabaya sendiri, upaya pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/251/402.1.04/1996 terdiri dari 61 obyek bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan SK Walikota Nomor 188.45/004/402.1.04/1998 yang terdiri dari 163 obyek bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya (Largus & Rochim, 2023)

Pemerintah Kota Surabaya sangat memperhatikan pengembangan sektor pariwisata. Beberapa destinasi yang menarik dikunjungi di Kota Surabaya adalah bangunan bersejarah yang sampai saat ini masih bisa dikatakan dirawat dengan baik salah satunya adalah Kota Lama Surabaya (Largus & Rochim, 2023). Selain itu juga mengelola kawasan tersebut secara profesional dan terkelola Oleh karena itu, melalui pertimbangan potensi dan kendala pengembangan KLTA tersebut, maka perlu dilakukan penelitian ini agar dapat memberikan masukan dalam pengembangan pariwisata di KLTA (Pattaray & Efendi, 2020).

Kawasan Kota Lama memiliki potensi wisata perkotaan yang perlu dikembangkan. Pemerintah Kota Surabaya memiliki keinginan besar untuk membuat KLTA. Namun, upaya untuk mewujudkan niat tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Tema rekultur dan warisan monumental ternyata tidak cukup untuk menarik minat wisatawan. Upaya pemerintah kota kepada masyarakat untuk mengangkat daya tarik sejarah belum membuahkan hasil yang optimal (Pattaray & Efendi, 2020).

Dalam pengelolaan pariwisata cagar budaya, keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan sangat penting. Pariwisata budaya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian objek tersebut. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, wisata semacam ini berpotensi merusak cagar budaya sampai lingkungan sosial. Contoh pemanfaatan yang ideal dapat dilihat di Bali, yang menggabungkan keseimbangan budaya dan pariwisata dalam kerangka Tri Hita Karana, menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan (kemendikbudristek). Pengunjung wisata cagar budaya juga diharapkan dapat lebih menghargai dan memahami nilai budaya serta sejarah tempat-tempat tersebut. Hal ini membantu memperkuat identitas dan kebanggaan budaya destinasi pariwisata di suatu kota (kemendikbudristek).



Gambar 1. 1 Kota Lama Surabaya sebelum revitalisasi

Sumber : <https://www.timenews.co.id/hiburan/99512978904/bocoran-tipis-tipis-perubahan-kota-lama-surabaya-yang-masih-proses-revitalisasi-menjelang-launching-pekan-ini?page=3>

Berikut merupakan contoh bangunan cagar budaya, yaitu Kota Lama Surabaya. Sebelum Kota Lama Surabaya berubah menjadi Kota Lama Tourism Area (KLTA) banyak bangunan di Kota Lama Surabaya yang terbengkalai, kusam, dan kurang terawat. Infrastruktur jalan, pedestrian, dan penerangan juga kurang memadai, sehingga kawasan ini cenderung sepi dan kurang menarik minat pengunjung. Beberapa bangunan bahkan tidak berfungsi atau hanya menjadi gudang. Fungsi bangunan-bangunan tua cenderung terbatas, banyak yang kosong atau hanya digunakan untuk aktivitas perdagangan tradisional yang kurang menarik wisatawan umum. Pusat kota dan ekonomi Surabaya telah bergeser ke arah barat dan timur, menyebabkan Kota Lama menjadi "tertinggal".



Gambar 1. 2 Upaya peresmian KLTA

Sumber : <https://www.alisson.id/penataan-kota-lama-surabaya-perlu-perhatikan-nasib-pedagang-wong-cilik-asongan/>

Pada tanggal 3/7/2024, rencana dan upaya pemerintah Kota Surabaya dalam perencanaan Kota Lama Tourism Area (KLTA) sebagai wisata cagar budaya akhirnya terlaksana. Namun sebelum Kota Lama Tourism Area (KLTA) resmi dibuka, sudah ada keresahan yang timbul dari para pedagang asongan yang berada di sekitar perencanaan Kota Lama Tourism Area (KLTA). Hal ini disampaikan para

pedagang asongan kepada Adree, salah satu peserta di komunitas PSL (Pernak-Pernik Surabaya Lama) yang sedang melakukan blusukan mewakili pelaku usaha UMKM PSL. Dalam pernyataannya, ia mengemukakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah seharusnya memberikan perhatian serius terhadap kelangsungan hidup para pelaku usaha kecil dari kalangan pedagang kaki lima dan asongan dengan menyediakan lokasi berjualan yang layak, di samping tetap memberikan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah setempat. Lebih lanjut, Adree menambahkan bahwa instansi yang memiliki kewenangan di bidang terkait kiranya perlu melakukan pendataan menyeluruh terhadap para pedagang asongan, sekaligus menetapkan sejumlah peraturan yang bersifat mengikat, seperti ketentuan mengenai perizinan, jadwal operasional perdagangan, serta berbagai aturan pendukung lainnya yang bertujuan menciptakan suasana yang tertib dan terpeliharanya kebersihan lingkungan. Dengan adanya langkah tersebut, mereka tidak perlu lagi menghadapi situasi yang meresahkan, seperti dikejar-kejar dan diusir oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Demikian disampaikan Adree kepada awak media Alisson.id pada Senin, 17 Juni 2024.

Hal ini terjadi karena pemerintah masih kurang menyoroti para pedagang asongan yang berada di sekitar KLTA. Secara implisit, keberadaan para pedagang asongan tersebut memang diatur dan dikendalikan, tetapi mereka menghadapi kendala berupa terbatasnya ruang usaha yang tersedia di kawasan sekitar KLTA, dengan pertimbangan bahwa aspek kenyamanan dan keselamatan pengunjung harus tetap menjadi prioritas utama. Pasaunya, upaya untuk meningkatkan daya

tarik kunjungan tidak semata-mata mengandalkan tersedianya sudut pandang visual yang menarik maupun keindahan fisik kawasan itu sendiri.

Berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, ketertiban, serta estetika yang ada di KLTA, para supir dari angkutan umum yang ada di KLTA juga sudah mulai diadakan dan diganti menjadi Suroboyo Bus. Suroboyo Bus dirancang untuk memberikan layanan transportasi yang lebih teratur, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi (misalnya dengan sistem pembayaran non-tunai atau melalui daur ulang sampah). Hal ini meningkatkan kenyamanan bagi pengguna dan mendukung mobilitas perkotaan yang lebih terintegrasi.



Gambar 1. 3 Kota Lama Tourism Area setelah revitalisasi

Sumber : <https://selalu.id/news-7518-dukung-revitalisasi-kota-lama-surabaya-sier-beri-bantuan-becak-wisata-listrik>

Dengan hilangnya angkutan umum di kawasan KLTA, banyak masyarakat yang tetap membutuhkan transportasi jarak pendek untuk menuju ke halte Suroboyo Bus atau lokasi lain. Tukang becak mengisi celah ini dengan memberikan layanan yang fleksibel dan mudah diakses. Dalam beberapa kasus, revitalisasi kawasan justru meningkatkan minat wisatawan atau masyarakat lokal terhadap transportasi tradisional seperti becak. Ini terjadi terutama jika kawasan tersebut

diubah menjadi area wisata yang lebih ramah pejalan kaki atau kendaraan non-motor. Kearifan lokal ini juga yang membuat naiknya tingkat kunjungan karena kearifan lokal tersebut menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke KLTA, untuk merasakan langsung menaiki kendaraan tradisional disekeliling wisata budaya.

Meskipun tingkat kunjungan yang begitu tinggi dari masyarakat surabaya dan sekitarnya untuk mengunjungi Kota Lama Toursim Area. Terbukti dari data yang didapatkan peneliti ketika mengunjungi KLTA, pengelola disana mengatakan perminggu wisatawan yang mengunjungi KLTA kisaran 1000-2000 orang. Hal ini yang harus menjadi perhatian kemendikbudpar beserta pemkot surabaya selaku pihak yang mengelola Kota Lama Tourism Area, untuk membuat kebijakan yang lebih ketat untuk menjaga Kota Lama Tourism Area.

Di sisi lain, terlepas dari berbagai dampak negatif yang menyertai peresmian kawasan wisata Kota Lama, terdapat pula kabar positif yang dapat dicermati. Mengacu pada laporan media "Pikiran Rakyat Surabaya" edisi 16 November 2024, Pemerintah Kota Surabaya tengah gencar melakukan upaya pembenahan dan peningkatan kualitas destinasi wisata tersebut. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah menjalin kemitraan dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia. Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui peluncuran inisiatif seni mural di sepanjang kawasan Kalimas Timur yang secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Pabean Cantikan. Kegiatan ini menjadi rangkaian dari acara yang bertajuk "Pekan Kota Lama Surabaya" dan dirancang dengan tujuan ganda,

yakni memperkuat daya pikat sektor pariwisata serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan tata ruang kawasan tersebut.

Ketika peneliti menulis penelitian ini, Kota Lama Tourism Area sudah resmi dibuka, namun sebelum hari peresmian, Kota Lama Surabaya sudah memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi kota lama itu sendiri dan juga masyarakat sekitar. Walaupun demikian, untuk mengetahui apakah seberapa banyak dampak pariwisata terhadap Ekonomi yang dihasilkan dari revitalisasi, dan adakah dampak yang lain dari segi sosial di Kota Lama Tourism Area (KLTA), tentu saja penulis membutuhkan penelitian dan analisis lebih mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian kali ini yakni Bagaimana Dampak Sosial Ekonomi Pariwisata Di Kota Lama Tourism Area (KLTA) Surabaya?.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Dampak Sosial Ekonomi Pariwisata Di Kota Lama Tourism Area (KLTA) Surabaya. Serta untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana dampak baik dan buruknya suatu tempat dengan kategori overtourism, yang mempengaruhi sosial dan ekonomi suatu destinasi dan masyarakat sekitar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui Dampak Sosial Ekonomi Pariwisata Di Kota Lama Tourism Area (KLTA) Surabaya.
2. Memberikan saran dan masukan kepada pihak pengelola.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai bahan rujukan literatur serta acuan bagi pelaksanaan studi-studi lanjutan di masa mendatang. Selain itu, temuan yang dihasilkan kiranya dapat menjadi landasan berpikir ataupun sumbangan gagasan dalam upaya memahami fenomena Dampak Sosial Ekonomi Kepariwisata di kawasan Kota Lama Tourism Area (KLTA) Surabaya, sekaligus menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan disiplin ilmu kepariwisataan secara lebih luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara terapan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta panduan bagi para pengelola kawasan agar dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan yang lebih efektif ke depannya. Langkah tersebut ditempuh guna menekan sekaligus mengantisipasi berbagai konsekuensi negatif yang mungkin timbul sebagai akibat dari aktivitas pariwisata di wilayah KLTA Surabaya. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyajikan informasi kepada para pemangku kepentingan di sektor wisata mengenai pengaruh sosial budaya terhadap suatu daerah tujuan, serta menyoroti urgensi perhatian terhadap kebijakan yang berlaku di destinasi tersebut.